

Dampak Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jayapura

Kam Tabuni*, Verdi Payung Tappi**, Eka Pravitasari Putri**, dan Ratna Mufidah**

* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025

Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

Belanja Daerah,
Pertumbuhan Ekonomi,
APBD,
Kota Jayapura.

ABSTRAK

Abstract : This study aims to analyze the impact of regional government expenditure on economic growth in Jayapura City. The background of this research is based on the phenomenon that the increase in per capita income has not fully reflected the welfare of society, especially among indigenous Papuans. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jayapura City for the period 2019–2023. The analytical method employed is simple linear regression using SPSS to examine the relationship between regional expenditure as the independent variable and economic growth as the dependent variable. The results indicate that regional expenditure has a positive relationship with economic growth, with a correlation coefficient of 0.596. The coefficient of determination of 0.356 implies that regional expenditure explains 35.60 percent of the variation in economic growth in Jayapura City, while the remaining percentage is influenced by other factors outside the model. The regression equation shows that a 1 percent increase in regional expenditure leads to a 26.699 percent increase in economic growth. These findings suggest that regional government spending, including operational, capital, and unexpected expenditures, plays a significant role in promoting regional economic growth. Therefore, effective and efficient management of regional expenditure is essential to ensure that economic growth becomes more inclusive and sustainable.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya pendapatan per kapita yang belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura selama periode 2019–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS untuk melihat hubungan antara belanja daerah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,596. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,356 menunjukkan bahwa belanja daerah mampu menjelaskan 35,60 persen variasi pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Persamaan regresi menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah sebesar 1 persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 26,699 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja daerah, baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dan alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Verdi Payung Tappi,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura - Papua
E-Mail : verdipayung@gmail.com

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu fenomena paling penting dalam perkembangan peradaban modern. Sejak dua abad terakhir, perekonomian dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, ketika sebagian besar masyarakat masih hidup pada tahap subsistensi dan bergantung pada sektor pertanian, perikanan, serta kegiatan berburu. Transformasi ekonomi tersebut telah melahirkan dua dampak utama yang mendorong perubahan sosial secara luas, yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat dan terbukanya lebih banyak kesempatan kerja bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, belanja daerah menjadi instrumen penting yang menentukan arah dan efektivitas pembangunan ekonomi. Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan program pembangunan, pelayanan publik, operasional pemerintahan, hingga investasi infrastruktur. Belanja tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan belanja yang baik diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan publik secara berkelanjutan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pemerintah dalam mengelola belanja daerahnya. Ketepatan alokasi belanja, baik untuk kebutuhan operasional maupun investasi modal, sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Dengan kata lain, belanja daerah berperan sebagai katalis yang mendorong peningkatan produktivitas, pemerataan kesejahteraan, serta daya saing ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kota Jayapura dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang menarik sekaligus paradoks. Pendapatan per kapita wilayah ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam kurun lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2023 nilai pendapatan per kapita mencapai 21,92 juta rupiah, melonjak tajam dibandingkan periode sebelumnya. Secara teoritis, kenaikan pendapatan per kapita tersebut menjadi sinyal positif bahwa produktivitas ekonomi daerah meningkat dan bahwa keberhasilan pembangunan mulai tercermin melalui meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini tampak terutama pada masyarakat asli Papua yang masih banyak hidup dalam kondisi kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan, serta minimnya peluang ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi lebih bersifat agregat dan belum menyentuh kesejahteraan riil sebagian besar penduduk lokal.

Kesenjangan ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara kinerja makroekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum mampu menjawab persoalan ketimpangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan kemungkinan adanya akumulasi pendapatan hanya pada sektor atau kelompok tertentu, sementara kelompok rentan, khususnya masyarakat asli Papua, tidak ikut menikmati hasil pembangunan secara proporsional.

Situasi tersebut mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas hidup, terutama ketika distribusi hasil pembangunan tidak merata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk bagaimana belanja daerah dialokasikan dan sejauh mana belanja tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tercatat secara statistik perlu ditelusuri kembali efektivitasnya dalam mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan di Kota Jayapura.

Lebih lanjut, meskipun dana otonomi khusus (Otsus) serta penerimaan pemerintah Kota Jayapura terus mengalami peningkatan selama satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura belum menunjukkan pola kenaikan yang konsisten. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura tidak rendah dan bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun hal ini tidak diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang proporsional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara tingkat belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura. Secara teoritis, peningkatan belanja

daerah seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, belanja daerah cenderung stagnan meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga menjadi ironi yang penting untuk dikaji lebih dalam.

Dengan melihat perkembangan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Jayapura dalam beberapa tahun terakhir, maka penting untuk melakukan analisis empiris mengenai bagaimana belanja daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menjadi relevan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pengelolaan APBD serta peran belanja daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi Kota Jayapura.

Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis angkat untuk diteliti dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek di Kota Jayapura ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka Panjang di Kota Jayapura ?

Landasan Teori

Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 Angka 1 UU 1/2022). Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 1 Angka 23 UU 1/2022). APBD menjadi instrumen kebijakan utama daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Konsep Pengeluaran Pemerintah

Aspek pengeluaran pemerintah dalam kajian tentang keuangan Negara maupun daerah merupakan aspek dari penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung yang dimiliki oleh masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, teori-teori tersebut dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro, secara mikro tujuan dari teori perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 UU 1/2022, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Definisi ini menekankan pada aspek akuntansi dan nilai ekonomi, di mana belanja merupakan penyerahan sumber daya ekonomi (berupa uang atau barang) untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (Allocation Function): Belanja daerah dialokasikan untuk menyediakan barang dan jasa publik (seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur) yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar.
2. Fungsi Distribusi (Distribution Function): Belanja daerah digunakan untuk mendistribusikan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah di dalam daerah.
3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Function): Melalui belanja daerah, pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas perekonomian regional, misalnya dengan meningkatkan belanja pada saat ekonomi lesu.

Perkembangan pasar juga akan menaikkan pendapatan nasional dan pertumbuhan penduduk dari masa ke masa yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak sedangkan Malthus dan Ricardo (Sukirno, 2000) berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten. Pada mulanya ketika jumlah penduduk/tenaga kerja relatif sedikit dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka pertambahan penduduk/tenaga kerja akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Akan tetapi apabila jumlah penduduk/tenaga kerja berlebihan dibandingkan dengan faktor produksi lain, maka pertambahan penduduk/tenaga kerja akan menurunkan produksi per kapital dan taraf kemakmuran masyarakat (Sukirno,

2000) faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat Ricardo (dalam Aryad, 1999).

Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Arsyad, 1999).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Adolf Wagner dalam teorinya mengatakan bahwa semakin lama belanja yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin meningkat. Pemikirannya ini didasari atas penelitian empiris yang dilakukannya pada negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat pada abad ke-19 serta didasarkan pada suatu teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang memandang pemerintah sebagai individu yang memiliki kuasa untuk bertindak bebas dari anggota masyarakat lainnya. Atas penelitian tersebut ia menemukan bahwa belanja pemerintah terus mengalami peningkatan terutama karena pemerintah harus mengatur kegiatan/hubungan/aktivitas yang ada dalam masyarakat (Idris, 2018). Hubungan-hubungan seperti pendidikan, kebudayaan, hukum, rekreasi, dan sebagainya merupakan kepentingan yang harus diatur oleh pemerintah, sebab di negara maju ketika terjadi kegagalan pasar, maka bisa saja kegagalan dari suatu industri menimpa industri lain yang saling berkaitan di negara tersebut. Selain itu meningkatnya belanja pemerintah juga disebabkan karena terjadinya urbanisasi, meningkatnya pendapatan masyarakat, tuntutan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, berkembangnya ekonomi dan demokrasi, serta ketidakefisienan birokrasi pemerintah (Dumairy, 1996). Teori Wagner ini juga dikenal dengan sebutan Hukum Wagner. Hukum Wagner dapat dituliskan dengan rumus:

$$\frac{PkPP_1}{PPK_1} < \frac{PkPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{PkPP_n}{PPK_n}$$

PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita

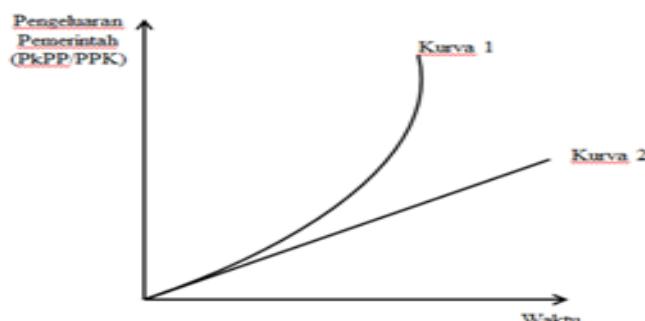
PPK : Pendapatan per kapita

1,2,...,n : Jangka waktu (tahun)

Sementara itu, kurva mengenai peningkatan belanja pemerintah yang digambarkan oleh Wagner dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Kurva pertumbuhan pengeluaran pemerintah digambarkan oleh Kurva 1 dengan bentuk eksponensial dan cembung bukan digambarkan oleh Kurva 2 yang berbentuk linear.

Gambar 1 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah



Sumber : Mangkoesoebroto (2001)

Pendekatan tentang Konsep Efisiensi, Efektivitas, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Menurut Kuncoro (2009), belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta klasifikasi menurut kelompok belanja, yaitu terdiri dari belanja; (i) Belanja langsung; belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, terdiri; (a). Belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, (b). Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, (c). Belanja modal/investasi yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. (ii) Belanja tak langsung; merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok biaya tak langsung, dibagi dalam jenis belanja terdiri dari; (a). Belanja pegawai; merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengertian belanja pegawai termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b). Belanja bunga; digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang, (c). Belanja subsidi; digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa layanan umum masyarakat, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, (d). Belanja hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik ditetapkan peruntuknya, (e). Bantuan sosial; digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. (f). Belanja bagi hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (g). Bantuan keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, (h). Belanja tidak terduga; digunakan untuk menganggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 54 PP 12/2019, jenis belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL): Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi merupakan pendukung operasional pemerintahan.
 - a) Belanja Pegawai (termasuk gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya).
 - b) Belanja Bunga.
 - c) Belanja Subsidi.
 - d) Belanja Hibah.
 - e) Belanja Bantuan Sosial.
 - f) Belanja Bagi Hasil.
 - g) Belanja Bantuan Keuangan.
 - h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung (BL): Belanja yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk barang/jasa. Belanja langsung dikaitkan langsung dengan output dan outcome.
 - a) Belanja Pegawai: Untuk honorarium dan upah tenaga non-ASN yang terlibat langsung dalam program/kegiatan.
 - b) Belanja Barang dan Jasa: Pengadaan barang dan jasa untuk mendukung program/kegiatan.
 - c) Belanja Modal: Pengadaan aset tetap berwujud seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, pembelian peralatan, dan modal bagi BUMD.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di Negara-negara sedang berkembang. Sebagian asli ekonomi mengartikan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang di ikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak ekonomi.

Asia Murni dalam bukunya Ekonomika Makro (2006 : 173) menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.

Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. kadang mengalami pertumbuhan ekonomis yang lambat atau kadang juga mengalami pertumbuhan yang pesat.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, jika jumlah produk barang dan jasa meningkat atau dengan kata lain terjadi perkembangan GNP potensial pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output per kapita. Dengan pertumbuhan per kapita, berarti terjadi upah riil dan meningkatnya standar hidup.

Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Menurut pandangan Adam Smith, kebijaksanaan *Laissez faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Adam Smith mengemukakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif.

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik.

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis pengembangan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan yang memunculkan teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Selanjutnya, menurut teori ini, rasio modal *output* (*capital output ratio = COR*) bisa berubah. Dengan adanya keluwesan ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu. Teori pertumbuhan Neo-Klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang dikenal dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yang bisa dituliskan dengan cara berikut: $Q_t = T_t^a K_t^b$, Di mana: Q_t : Tingkat produksi pada tahun t , T_t : Tingkat teknologi pada tahun t , K_t : Jumlah stok barang modal pada tahun t , L_t : Jumlah tenaga kerja pada tahun t , a : Pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal, b : Pertambahan *output* yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja, Nilai T_t , a dan b bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan saja besarannya dengan menganggap bahwa $a + b = 1$, yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan *output*.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

1) Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan: 1. Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional. 2. Prasyarat lepas landas, adalah suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*). 3. Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru. 4. Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam. 5. Masyarakat berkonssumsi tinggi, adalah suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

2) Teori Pertumbuhan Kuznet

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok yaitu:

- Kenaikan *output* secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) di suatu negara yang bersangkutan.
- Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan.
- Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi sosial berarti potensi ada, akan tetapi tanpa *input* komplementernya maka hal itu tidak bisa membawa hasil apapun.

3) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar.

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional. Adapun model pertumbuhan ekonomi yang bisa ditunjukkan berdasarkan teori Harrrod Domar adalah sebagai berikut:

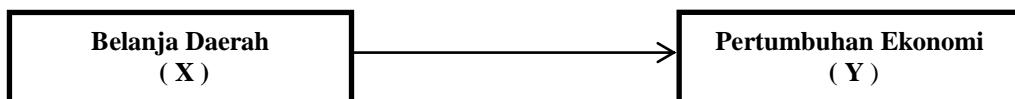
- 1) Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari *output* total (Y), oleh karenanya nilai mempunyai persamaan yang sederhana: $S = s \cdot Y$
- 2) Investasi didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan ΔK , maka: $I = \Delta K$
Tetapi karena stok modal (ΔK) mempunyai hubungan langsung dengan *output* total (Y), seperti ditunjukkan oleh COR atau k , maka: $K/Y = k$ atau $\Delta K/Y = k$ atau $K = k \cdot Y$.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mangkoesoebroto (1997) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kredibilitas sistem pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori pengeluaran makro dan mikro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu; model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah dan Teori Peacock & Wiseman (dalam Mangkoesoebroto 1988). Teori perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, menengah dan lanjut. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap *Gross National Product* (GNP) semakin besar dan persentase pemerintah semakin kecil. Pada tingkat yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Lain halnya dengan hukum Wagner yang justru mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Sumber : Kreasi Penulis 2024

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diproses dengan pengumpulan data-data sekunder yaitu mendatangi langsung ke kantor Badan Pusat Statistik dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura untuk mengambil data sekunder. Selain itu digunakan juga metode studi Kepustakaan dan pencarian data tambahan melalui internet.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada lokasi di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, dengan waktu penelitian 3 (tiga) bulan.

Analisa Data

Berikut adalah data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian tentang data pertumbuhan ekonomi dan jumlah rakyat tangga miskin, seperti pada tabel berikut :

Tabel 1 Belanja Daerah (Juta Rupiah)

NO	Tahun	Belanja Daerah	%
1	2019	1.260.474,27	-
2	2020	1.149.853,77	-8,78
3	2021	1.324.953,79	15,23
4	2022	1.457.449,17	10,00
5	2023	1.603.194,08	10,00

Sumber : Kantor BPS Kota Jayapura, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja daerah (belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga) Kota Jayapura tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2020, penurunan belanja daerah hanya terjadi pada tahun 2020 sedangkan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sampai tahun 2023, dengan rata-rata peningkatan dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,29 persen. Dan berikut data pertumbuhan ekonomi seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

NO	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	%
1	2019	6,26	-
2	2020	-0,95	-115,18
3	2021	3,50	-468,42
4	2022	5,14	46,86
5	2023	4,87	-5,25

Sumber : Kantor BPS Kota Jayapura, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Jayapura tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar -0,95 persen, hal ini merupakan efek atau dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk kota Jayapura, tahun 2021 merupakan angin segar atau hal baik sedang terjadi dimana jumlah pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 mengalami pertumbuhan 4,45 persen. selanjutnya dimana tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 46,86 persen dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 5,25 persen dengan rata-rata penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -108,40 persen per tahun.

Pembahasan

Berdasarkan hasil output SPSS penulis merangkumkan hasil regresi dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 ^a	,356	,141	2,24186

Nilai r koefisien korelasi (r) sebesar 0,596 atau 59,60 persen artinya bahwa variabel X (belanja daerah) dan Y (pertumbuhan ekonomi) mempunyai hubungan positif yang kuat atau kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang searah artinya jika belanja daerah mengalami kenaikan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Jayapura. Nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,356$ atau 35,60 persen artinya bahwa belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal maupun belanja tak terduga berpengaruh terhadap perubahan nilai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 35,60 persen sedangkan sisanya 64,40 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, atau variabel belanja daerah di Kota Jayapura hanya mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 35,60 persen terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap perubahan jumlah pertumbuhan ekonomi, dan berikut Coefficients^a.

Tabel 4 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1,597	127,122		-1,256	,298
Belanja Daerah	26,699	20,744	,596	1,287	,288

Berdasarkan tabel output SPSS diatas didapatkan nilai konstanta (a) sebesar -1,597 menunjukkan bahwa apabila variabel belanja daerah tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,597 artinya bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sedangkan nilai koefisien regresinya sebesar 26,699 artinya bahwa jika belanja daerah di naikan 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 26,699 persen. Atau dengan kata lain $Y = -1,597 + 26,699$, dengan estimasi

dapat diinterpretasikan sebagai berikut : bahwa belanja daerah (X) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura dengan besar koefisien 26,699. Artinya apa bila belanja daerah naik sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura akan mengalami peningkatan sebesar 26,699 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi mendorong pemerintah Kota Jayapura untuk menaikkan belanja daerah sebab belanja daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tingkat regional atau lokal. Belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas umum lainnya) akan meningkatkan koneksi antar wilayah dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga dapat menarik investasi swasta dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Jayapura, ketika pemerintah kota Jayapura membelanjakan dana untuk proyek-proyek publik, hal ini memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka konsumsi juga akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat permintaan barang dan jasa di pasar lokal.

Belanja daerah yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan SDM yang lebih berkualitas, produktivitas tenaga kerja meningkat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Program-program sosial dan bantuan langsung yang didanai dari belanja daerah bisa membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan berkurangnya kemiskinan, masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang meningkatkan kualitas hidup serta daya beli mereka. Belanja daerah juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Pada saat ekonomi melambat, pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja untuk merangsang ekonomi, sebaliknya, pada saat ekonomi memanas, belanja dapat dikurangi untuk menghindari inflasi berlebihan, namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada efisiensi penggunaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas, belanja yang tidak tepat sasaran atau korupsi bisa mengurangi dampak positif yang seharusnya tercipta.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh faktor antara lain :

1. Sumber Daya Alam. Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam seperti Pantai, hutan, dan tanah pertanian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kota Jayapura dengan kekayaan sumber daya alam seperti panorama Pantai, tanah pertanian, perkebunan cenderung memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan dari sektor ini. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan juga dapat menimbulkan masalah lingkungan dan menghambat pertumbuhan jangka panjang.
2. Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan kuantitas tenaga kerja memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat menentukan produktivitas tenaga kerja. Negara dengan tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas tinggi lebih mampu menghasilkan output yang tinggi dan bersaing dalam pasar global.
3. Investasi Modal. Investasi dalam bentuk modal fisik seperti mesin, pabrik, infrastruktur, dan teknologi modern meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. Modal yang memadai memungkinkan peningkatan produksi dan menciptakan nilai tambah. Investasi modal juga dapat datang dari dalam negeri maupun asing, yang biasanya membawa teknologi dan keterampilan baru.
4. Kemajuan Teknologi. Teknologi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan memperluas jangkauan pasar. Kota Jayapura yang berhasil mengadopsi dan mengembangkan teknologi cenderung mengalami peningkatan produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.
5. Stabilitas Politik dan Kebijakan Pemerintah. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah Kota Jayapura yang pro-pertumbuhan (seperti kebijakan perpajakan yang mendukung bisnis, insentif investasi, regulasi yang sederhana) memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi di Kota Jayapura akan menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.
6. Permintaan dan Konsumsi Domestik. Tingkat konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli masyarakat tinggi, permintaan barang dan jasa meningkat, yang pada akhirnya mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja. Konsumsi domestik yang kuat juga membantu menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika permintaan global menurun

Kesimpulan

1. Nilai r koefisien korelasi (r) sebesar 0,596 atau 59,60 persen artinya bahwa variabel X (belanja daerah) dan Y (pertumbuhan ekonomi) mempunyai hubungan positif yang kuat atau kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang searah artinya jika belanja daerah mengalami kenaikan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Jayapura. Nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,356$ atau 35,60 persen artinya bahwa belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal maupun belanja tak terduga berpengaruh terhadap perubahan nilai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 35,60 persen sedangkan sisanya 64,40 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, atau variabel belanja daerah di Kota Jayapura hanya mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 35,60 persen terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai konstanta (a) sebesar -1,597 menunjukkan bahwa apabila variabel belanja daerah tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,597 artinya bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sedangkan nilai koefisien regresinya sebesar 26,699 artinya bahwa jika belanja daerah di naikan 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain : sumber daya alam, sumber daya manusia (sdm), investasi modal, kemajuan teknologi, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah dan permintaan dan konsumsi domestik.

Saran

1. Pemerintah Kota Jayapura harus tetap memacu sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pembentukan nilai produk domestik regional bruto, agar pertumbuhan ekonomi ekonomi bisa meningkat yang akan berpengaruh bagi penurunan jumlah rakyat miskin.
2. Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat agar kedepannya mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan.
3. Pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan sektor-sektor formal yang ada untuk bisa mempekerjakan orang asli papua (OAP).
4. Belanja daerah dialokasi terfokus pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi atau sektor yang menyumbang perutmbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, Kota Jayapura dalam Angka 2024
- Boediono, 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama. Penerbit BPFE – Yogyakarta.
- Mankiw Gregory. *Pengantar Ekonomi*, Edisi Kedua Jilid 1, Penerbit Erlangga.
- Nasir Moh., Ph.D, 2003. *Metode Penelitian*, Cetakan ke-5 Penerbit Ghalia Indonesia.
- Prathama Rahardja, 2008. *Teori Ekonomi Makro*, Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)* Edisi Revisi, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno Sadono, 2004. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. PT. Raja Grafiqa Persada, Jakarta.
- Triyanto Suseno Widodo. *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*.
- Supranto. J , 2001. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Edisi Keenam Jilid 2. Penerbit Erlangga.
- Winarno Sigit., SE. Sujana, Ismaya, SE. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*, Penerbit Pustaka Grafika.
- Arianto, Cristiawan Eka. 2015. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember. Universitas Jember.
- Try Phandri (2015). Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Luwu Timur. Universitas Negeri Makassar.
- Jhingan, M,L. 2013. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta.Rajawali. Muhamarram,
- Nur Adi. 2015. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Penangguran Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta.Erlangga. Ningsi, Fahmi Ratna, (2010). Pengaruh Inflasi dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1988-2008. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah Jakarta, Jakarta.